

**PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
DAN STRUKTUR DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA SKPD
KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA**

Sahrul Hi. Posi

Program Studi Akuntansi, Universitas Hein Namotemo

Jalan Kompleks Pemerintahan Halmahera Utara Villa Vak I, Tobelo-Halmahera Utara 7762

E-mail: sahrulposi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh dari Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ternate. Pada penelitian ini kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berfungsi sebagai variabel dependen. Ada tiga variabel yang berfungsi sebagai variabel independen, yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi. Jenis penelitian ini ialah pengujian Hipotesis yaitu penelitian yang biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji hipotesis (uji t dan f). Sampel dalam penelitian ini yaitu semua kepala sub pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bagian yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran dan data dikumpulkan melalui metode kuesioner.

Hasil penelitian ini bahwa variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan untuk variabel struktur desentralisasi berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan dari hasil uji simultan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ternate.

Kata kunci : *Partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi, kinerja SKPD*

ABSTRACT

This study aims to determine the Influence of Participation in Budget Formulation, Clarity of Budget Objectives and Decentralization Structures on Performance of Regional Work Unit of Ternate City. In this study the performance of the Regional Device Work Unit functions as a dependent variable. There are three variables that function as independent variables, namely participation in budgeting, clarity of budget goals, and decentralization structure. This type of research is Hypothesis testing is research that usually explains the nature of a particular relationship or determine the differences between groups or the freedom of two or more factors in a situation. The data analysis technique used is data quality test, normality test, heteroscedasticity test, multicolonierity test, autocorrelation test and hypothesis test (t and f test). Sample in this research that is all sub head at Unit Work Unit of Area which is directly involved in arranging budget and data collected by questionnaire method

The result of this research is that the variable of participation in budgeting, clarity of budget target has significant influence to the performance of the regional apparatus unit, while for the variable of decentralization structure has no significant effect on the performance of the regional apparatus unit. From the simultaneous test result that participation in budgeting, clarity of budget targets, and the structure of decentralization together (simultaneously) have a significant effect on the performance of the Regional Work Unit of Ternate City.

Keywords: *Participation in budgeting, clarity of budget targets, decentralization, SKPD performance*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah, sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009) yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran merupakan alat perencanaan manajerial dalam bentuk keuangan yang berisi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan selama periode waktu tertentu sebagai acuan kegiatan organisasi dan menunjukkan tujuan organisasi. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kejelasan sasaran anggaran yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Lingkup sektor publik di Indonesia mengenal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rancangan tersebut memuat pos-pos pendapatan dan belanja yang menjadi sasaran atau target yang hendak dicapai selama satu tahun.

Penyusunan anggaran publik merupakan suatu proses yang cukup rumit. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor privat. Anggaran pada sektor privat merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Sebaliknya pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2009).

Pada dasarnya proses penyusunan anggaran adalah merupakan kegiatan yang penting dan melibatkan berbagai pihak, seperti manajer dan bawahan yang sama-sama memegang peranan penting dalam mempersiapkan dan mengevaluasi penyusunan anggaran tersebut serta tujuan dari anggaran itu sendiri, dan anggaran juga dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja manajer.

Secara teknis, perkiraan keadaan yang akan terjadi di masa mendatang menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan anggaran. Keadaan internal yang berada di bawah kendali semestinya bisa diakomodasikan dengan baik. Persoalan yang muncul adalah perubahan-perubahan eksternal yang berada di luar

kendali sehingga sulit diperkirakan. Kemampuan melihat jauh ke depan semacam ini yang akan menentukan ketepatan anggaran dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dengan realisasinya menjadi indikator "keberhasilan" penyusunan anggaran. Sebagai konsekuensinya, penyusun cenderung selalu bersikap mencari aman dengan menetapkan anggaran pada angka yang relatif rendah dengan harapan agar dapat dengan mudah dicapai realisasinya.

Kesalahan memprediksi akan mengacaukan rencana yang telah disusun dan berdampak terhadap penilaian kinerjanya. Anggaran pada sektor publik meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Anggaran sebagai perencanaan yang dimaksud adalah anggaran merupakan rencana kegiatan yang terjadi dari sejumlah target yang akan dicapai oleh para pimpinan dari suatu instansi dalam melaksanakan kegiatan tertentu pada masa yang akan datang. Anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan dalam sistem pengendalian manajemen, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi yang menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah, menjadi relevan dan penting.

Anggaran sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan, sedangkan dalam struktur desentralisasi penyusunan APBD harus berdasarkan partisipasi, kejelasan sasaran anggaran dan struktur yang terdesentralisasi yang berlandaskan pada: Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah cq. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran menjadi sangat penting dan relevan di Pemerintah Daerah karena anggaran berdampak pada kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam member pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2009).

Partisipasi anggaran adalah suatu proses yang didalamnya terdapat individu yang terlibat dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan target anggaran yang akan dievaluasi dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut. Partisipasi perangkat daerah dalam menyusun anggaran tercermin dalam proses penyusunan APBD. Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran. Maasing-masing SKPD memuat Rancangan Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA-SKPD.

Dalam RKA-SKPD, masing-masing SKPD telah memuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam RKA telah memuat *input, output* dan *outcome* dari masing-masing program dan kegiatan, jadi dalam RKA telah memuat sasaran anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya selanjutnya melalui proses penyusunan anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja pemerintah daerah akan meningkat, karena proses partisipasi memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, serta bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi (Muhammad, 2007)

Dalam otonomi daerah struktur organisasi tidak sentralistik melainkan dekonsentrasi, yang pada saat ini Indonesia sedang dalam proses implementasi desentralisasi dengan intensitas yang tinggi, terhadap perbedaan yang mendasar dalam penetapan APBD antara sebelum dan sesudah otonomi daerah yaitu dalam struktur desentralisasi, penetapan APBD didasarkan pada keputusan pihak-pihak tertentu (Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah), masing-masing SKPD kurang berperan dalam proses penyusunan anggaran. Pentingnya desentralisasi bagi efektivitas penggunaan anggaran telah terbukti secara empiris, desentralisasi yang tinggi merupakan bentuk yang tepat untuk menghadapi peningkatan ketidakpastian sehingga menunjang pencapaian kinerja. Desentralisasi di sektor pemerintahan terjadi dari kepala daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan sekretaris daerah. Desentralisasi dalam hal ini adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah tersebut. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun format Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD (Bastian, 2006)

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ternate yang merupakan salah satu organisasi sektor publik yang menjalankan otonomi daerah sesuai aturan dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Demikian pula kinerja anggaran sektor publik boleh dikatakan belum dikelola secara maksimal karena pengukuran kinerja anggaran lebih dilihat pada rencana dan realisasi anggaran tanpa menitikberatkan pada *outcome*, hal ini dikarenakan

kinerja anggaran lebih dikaitkan dengan pelaksanaan anggaran tanpa melihat pada hasil dari pemanfaatan suatu anggaran. Penelitian yang berkaitan dengan anggaran berbasis kinerja.

Penelitian-penelitian tentang anggaran sudah banyak dilakukan, sementara penelitian tentang ketepatan anggaran sepanjang pengetahuan penulis, masih sedikit dilakukan seperti Aristanti (2011) Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack* serta pengaruh gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi, sebagai berikut: Partisipasi anggaran berpengaruh langsung dan positif terhadap munculnya *budgetary slack*. Artinya semakin tinggi tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran maka akan semakin tinggi *budgetary slack* (senjangan anggaran) yang ditimbulkan, Pengaruh partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack* tidak dimoderasi oleh gaya kepemimpinan, dalam hal ini gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan. Nurhalimah,dkk (2013) dalam penelitian ini mengatkan bahwa, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah.

Dengan acuan pada uraian di atas, peneliti memandang anggaran pemerintah daerah merupakan suatu realisasi sosial yang disusun dengan adanya interaksi sosial antara berbagai pihak. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman atas fenomena penganggaran dengan berfokus pada kinerja aparat pemerintah daerah khususnya kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Ternate, sekaligus untuk memberikan bukti empiris pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mengenai partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja SKPD Kota Ternate.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran

Partisipasi dalam penyusunan anggaran diartikan oleh Mulyadi (2001), sebagai “keikutsertaan operating managers dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang akan datang yang akan ditempuh oleh operating managers tersebut dalam pencapaian sasaran

anggaran". Partisipasi anggaran sebagai 'suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya". Lebih lanjut disampaikan bahwa "anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku".

Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 memuat Kepala SKPD menyusun Rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Makna partisipasi adalah pelibatan SKPD dalam penyusunan anggaran daerah (APBD). Kepala SKPD (sekretariat, dinas, badan, kantor, inspektorat, dan satuan polisi pamongpraja) merupakan pengguna anggaran/pengguna barang, yang diberi kesempatan untuk mengajukan usulan terkait dengan pelaksanaan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) SKPD yang dipimpinnya. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 93, dijelaskan bahwa Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. Dalam penyusunan RKA-SKPD target harus disebutkan dengan jelas, sasaran (target) itu sendiri merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Pencapaian hasil program yang efektif dapat dinilai dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil berdasarkan target yang telah ditetapkan.

2.2. Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rencana kerja Pemerintah daerah merupakan desain teknis pelaksanaan strategi

untuk mencapai tujuan daerah. Jika kualitas anggaran pemerintah daerah rendah, maka kualitas fungsi-fungsi pemerintah cenderung lemah. Anggaran daerah seharusnya tidak hanya berisi mengenai informasi pendapatan dan penggunaan dana (belanja), tetapi harus menyajikan informasi mengenai kondisi kinerja yang ingin dicapai. Anggaran Pemerintah daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.

Bastian (2006) Menentukan kejelasan sasaran anggaran tersebut telah disusun Kepala daerah berdasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan menteri dalam negeri setiap tahun menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA (Kebijakan Umum APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan dibidang pendapatan, belanja dan pendanaannya serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun.

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran tersebut lazim disebut perencanaan dan pengendalian laba yaitu proses yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian secara efektif. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, kinerja suatu unit organisasi dinilai baik secara finansial.

2.3. Struktur Desentralisasi

Struktur organisasi desentralisasi secara umum ditujukan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam struktur sentralisasi yang tinggi, sebagian keputusan diambil pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih desentralisasi.

Desentralisasi yang ditampakkan dalam penyusunan anggaran menyebabkan semakin luasnya tanggung jawab unsur-unsur pelaksanaan penyusunan anggaran serta kebijakan secara independen, sehingga semakin tinggi pula wewenang manajer dalam mengambil keputusan yang tepat pada struktur desentralisasi. Dengan demikian manajer puncak dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada manajer bawahannya dalam

pembuatan keputusan, sehingga membawa konsekuensi tanggung jawab semakin besar bagi pimpinan yang lebih rendah terhadap implemmentasi terhadap keputusan yang dibuat (Diana,2013).

Dierah desentralisasi saat ini, realisasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang ditunjukan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah, masih dalam proses perbaikan secara bertahap. Penyusunan perencanaan dan implementasi program layanan bagi masyarakat lebih banyak diberikan pada peran SKPD dibandingkan pada peran pemerintah berdasarkan berdasarkan struktur pemerintahan yang ada, terutama di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi pada alokasi pembiayaan pembangunan yang lebih besar di SKPD dibandingkan pada pemerintah ditingkat kecamatan dan desa di daerah tersebut

2.4. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menurut PP No.58 Tahun 2005, Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumberdaya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Marsdiasmo, 2009)

Disamping itu pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang bersifat komprehensif, dimana setiap SKPD sebagai pengguna anggaran (badan/ dinas/biro/ kantor) akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki. Semakin bagus tingkat pengelolaan keuangan oleh pengguna

anggaran maka akan semakin tinggi tingkat kinerja SKPD.

Peran dan fungsi SKPD menjadi sangat penting karena sebagai pengguna anggaran tiap SKPD yang ada pada Badan/Dinas/Kantor/Biro pada pemerintah daerah melakukan hampir seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah minus pemeriksaan. Keluarnya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 yang menetapkan bahwa APBD harus disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja membuat SKPD sebagai unit yang menggunakan anggaran dituntut untuk dapat mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang benar-benar baik, artinya sesuai dengan kebutuhan, efektif, ekonomis dan efisien

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kausal (*causal*) yang berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung. Sumarni dan Wahyui (2006), mengungkapkan bahwa konsep hubungan kausalitas dalam penelitian secara teoritis bermaksud untuk mengetahui hubungan dan pengaruh beberapa variabel melalui pengujian hipotesis.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala bagian dan pejabat penata usaha keuangan organisasi di SKPD Pemerintah Kota Ternate Sebanyak 28 SKPD antara lain:

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Keterangan SKPD	Populasi	Sampel
1	Sekretaris daerah	1	9
2	Sekretaris Dewan	1	4
3	Badan	6	24
4	Dinas	15	75
5	Kantor	4	15
6	Inspektorat	1	8
Jumlah		28	135

Pengambilan sampel untuk setiap SKPD sesuai dengan proporsi masing-masing SKPD berdasarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proporsional *random sampling* yaitu setiap populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk

mendeskripsikan persentase masing-masing variable. Pengukuran pada variabel yang diungkap dilakukan dengan memberikan skor dari jawaban instrument yang diisi oleh responden, untuk pembuatan skor, digunakan skala likert untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap serangkaian pernyataan yang mengukur suatu obyek. Skor yang diberikan untuk setiap jawaban adalah sebagai berikut:

- 1) Angka 5 mewakili skala Sangat Setuju (SS)
- 2) Angka 4 mewakili skala Setuju (S)
- 3) Angka 3 mewakili skala Kurang Setuju (KS)
- 4) Angka 2 mewakili skala Tidak Setuju (TS)
- 5) Angka 1 mewakili skala Sangat Tidak Setuju (STS)

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dengan menggunakan bantuan alat statistik analisis regresi berganda. Analisis dengan bantuan alat statistik ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen (X) yang terdiri dari variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap variabel dependen (Y) yaitu kinerja SKPD Kota Ternate. Sugiyono (2005), untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka digunakan metode regresi berikut ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Kinerja SKPD

X1 = Partisipasi dalam penyusunan anggaran

X2 = Kejelasan sasaran anggaran

X3 = Struktur desentralisasi

e = Ksalahan Residual

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Analisis Regresi dengan bantuan aplikasi *software Stastistical Program For Social Science* (SPSS). Analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis.

1. Uji validitas dan reabilitas
2. Uji asumsi klasik
3. Uji regresi linier berganda

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

1. Uji Validitas dan Realibilitas

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dapat menggunakan software statistic, nilai validitas Dimana Nilai validitas dapat dilihat dengan menggunakan *Corrected Item-Total Colleration*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka instrument tersebut dikatan valid. Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk mengukur variable penelitian dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , dimana nilai r_{tabel} untuk sampel sebanyak 105 adalah 0,236, sebagai mana dapat digambarkan pada table dibawah ini:

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Butir Instrumen	Koefisien Korelasi	Ket
Kinerja SKPD	KS1	0,370	Valid
	KS2	0,507	Valid
	KS3	0,599	Valid
	KS4	0,378	Valid
	KS5	0,472	Valid
	KS6	0,247	Valid
Partisipasi Penyusunan Anggaran	PART1	0,518	Valid
	PART2	0,606	Valid
	PART3	0,660	Valid
	PART4	0,374	Valid
	PART5	0,407	Valid
	PART6	0,526	Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran	KSA1	0,602	Valid
	KSA2	0,482	Valid
	KSA3	0,552	Valid
	KSA4	0,557	Valid
	KSA5	0,616	Valid
	KSA6	0,558	Valid
Struktur Desentralisasi	SD1	0,663	Valid
	SD2	0,792	Valid
	SD3	0,802	Valid
	SD4	0,770	Valid
	SD5	0,795	Valid
	SD6	0,730	Valid

b. Uji Realibilitas

Pengujian Uji Reliabilitas data dapat dilihat dengan menggunakan Alpha Croanbach. Jika *Alpha Croanbach* > 0,60 maka hasil pengujian

data dinyatakan reabel dan tidak reabel jika sama dengan atau dibawah 0,60.

Tabel 3. Uji Realibilitas

Variabel	Alpha Cronbach's	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kinerja SKPD (Y)	0,699	0,6	Reliabel
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X ₁)	0,758	0,6	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₂)	0,794	0,6	Reliabel
Struktur Desentralisasi (X ₃)	0,912	0,6	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan semua variabel yang terdiri dari variabel Kinerja SKPD, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi adalah reliabel karena alpha menunjukkan angka yang lebih dari 0,60.

2. Diskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh diskripsi data penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Deskripsi Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Error	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Kinerja SKPD	105	3.17	5	4.092	0.03561	0.36494
Partisipasi Penyusunan Anggaran	105	1.15	5	3.985	0.04804	0.49231
Kejelasan Sasaran Anggaran	105	1.67	5	3.968	0.04868	0.49883
Struktur Desentralisasi	105	1	5	3.205	0.07937	0.8133
Valid N (listwise)	105					

Nilai rata-rata Kinerja SKP sebesar 4.0920 yang menunjukkan bahwa Kinerja SKPD di Kota ternate cukup tinggi. Kinerja SKPD diprediksikan tinggi jika mempunyai nilai rata-rata 4. Partisipasi Penyusunan Anggaran responden dengan nilai rata-rata sebesar 3.9850, menunjukkan bahwa responden mempunyai partisipasi yang cukup tinggi dalam proses penyusunan anggaran di masing-masing SKPD. Kejelasan sasaran Anggaran dengan nilai rata-rata sebesar 3.9683 menunjukkan bahwa tingkat kejelasan sasaran anggaran cukup jelas, sedangkan untuk Struktur Desentralisasi yang dilakukan Pemerintah Kota ternate diprediksikan rendah Karena hanya memiliki nilai rata-rata hanya sebesar 3.2051.

3. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat normalitas model regresi. Berdasarkan table uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 5. uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	105
Normal Parameters ^a	
Mean	.0000000
Std. Seviation	.29533864
Absolute	.114
Positive	.114
Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z	1.173
Asymp. Sig. (2-tailed)	.128

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi normal. Hal ini diketahui dengan melihat nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1.173 dengan tingkat signifikansi 0.128 jika signifikansi nilai *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0.05 maka dapat dinyatakan data mempunyai distribusi normal.

b. Pengujian Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji korelasi diantara variabel *independen*, dapat dilihat bahwa korelasi diantara variable tersebut antara lain nilai VIF X_1 adalah 1,222, VIF X_2 adalah 1,282 dan VIF X_3 adalah 1,116, semuanya lebih kecil sehingga tidak ada masalah multikolinearitas.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Sataticistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant		
PART	0.819	1.222
KSA	0.78	1.282
SD	0.896	1.116

a. Dependent Variable: Y

c. Pengujian Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas

Pengujian asumsi heterokedastisitas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas dalam metode regresi.

d. Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05.

Tabel. 7 . Pengujian Parsial (Uji- t)

Model	Unstandardize d Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant	2,191	0,284		7.725	0
PART	0,284	0,066	0.303	4.3	0
KSA	0,257	0,067	0.351	3.853	0
SD	0,078	0,038	-0.173	-2.037	0.044

a. Dependent Variable:Y

e. Pengujian Secara Simultan (Uji-f)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variable dependen secara silmutan, pengujian dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} . adalah sebagai berikut:

Tabel.8. Pengujian Simultan (Uji-f)

Model	Anova				
	Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Sig.
1 Regression	4.779	3	1.593	17.737	.000 ^a
Residual	9.071	104	0.09		
Total	13.851	104			

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

b. Dependent Variable : Y

4.2. PEMBAHASAN

Model regresi yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan t. berikut ini merupakan hasil uji regresi dan uji t tiap hipotesis:

Tabel. 9. Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 Constant	2,191	0,284		7.725	0
PART	0,284	0,066	0.303	4.3	0
KSA	0,257	0,067	0.351	3.853	0
SD	0,078	0,038	-0.173	-2.04	0.04

a. Dependent Variabel: Y

R = 0,587

Adjusted R² = 0,326

F = 17,737

Sig. F = 0,000

Hasil pengolahan data uji F menunjukkan nilai $F_{hitung} = 17,737$ dan signifikan pada level 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5$ persen), yang berarti model yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan layak. Selanjutnya besarnya nilai *Adjusted R Squares* adalah 0,326 yang berarti variabilitas variable terkait yang dapat dijelaskan variable bebas sebesar 32,6 persen, sedangkan untuk sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dilakukan dalam penelitian ini.

Hipotesis selanjutnya menyatakan bahwa ada pengaruh negatif struktur desentralisasi pada kinerja SKPD, hasil uji t menunjukkan bahwa struktur desentralisasi bernilai negatif yaitu -2.037 dengan tingkat signifikansi 0,044 lebih kecil dari ($\alpha=5$ persen). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negative struktur desentralisasi pada kinerja SKPD.

Dari uji ANOVA atau *Ftest*, ditemukan bahwa F hitung dengan tingkat signifikan 0,000, karena propabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap SKPD. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan maka model penelitian adalah :

Kinerja = 2,191 + 0,284 PART + 0,257 KSA + -0,078 SD + e

1. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran (X₁) terhadap Kinerja SKPD Kota Ternate (Y)

Pada hasil regresi untuk menjawab hipotesis 1 menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD Kota Ternate. Artinya bahwa semakin besar partisipasi dalam penyusunan anggaran yang diberikan maka semakin tinggi pula tercapainya ketetapan anggaran pendapatan dan belanja di SKPD, hal ini juga menimbulkan dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran yang jelas merupakan sarana bagi pegawai untuk dapat lebih mengerti terhadap apa yang mereka kerjakan selanjutnya, partisipasi penyusunan anggaran juga membantu pegawai untuk memperbaiki kinerja mereka

dengan mengetahui target anggaran. Partisipasi juga merupakan kunci dari kinerja yang efektif dalam pencapaian tujuan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Andaris (2009) dan Supriyanto (2010) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X₂) terhadap Kinerja SKPD (Y)

Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran (X₂) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD Kota Ternate, sehingga hipotesis yang menyatakan “Bahwa kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD Kota Ternate” dalam penelitian ini dinyatakan Diterima. Artinya bahwa semakin besar kejelasan sasaran anggaran yang diberikan maka semakin tinggi tercapainya ketepatan anggaran pendapatan dan belanja di SKPD. Hal ini disebabkan dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka pegawai dapat membandingkan apa yang dilakukan dengan sasaran anggaran itu sendiri, dan kemudian menentukan dimana posisinya saat ini, selanjutnya akan menimbulkan sebuah motivasi tersendiri bagi pegawai untuk berusaha lebih baik dalam mencapai sasaran anggaran yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhartono dan Solichin (2006), Menyatakan bahwa adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Pengaruh Desentralisasi (X₃) terhadap Kinerja SKPD (Y)

Pada hasil persamaan regresi untuk menjawab hipotesis 3 dengan menunjukkan bahwa struktur desentralisasi (X₃) berpengaruh secara negatif terhadap kinerja SKPD, sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa struktur desentralisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD, Sehingga Hipotesis diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andaris (2009) struktur desentralisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja SKPD. Intensitas partisipasi anggaran dan derajat struktur organisasi yang terdesentralisasi akan meningkatkan atau menurunkan kinerja orang yang terlibat didalam partisipasi dan struktur tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas maka dapat di tarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD Kota Ternate.
2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Ternate
3. Struktur Desentralisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja SKPD Kota Ternate

Selanjutnya dari hasil penelitian didapatkan bahwa hasil dimana kontribusi variable partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi sebesar 0,326 yang berarti variabilitas variable dependen yang dapat dijelaskan oleh variable independen sebesar 32,6% sementara 67,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Maka disarankan untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel lain, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja SKPD.

dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Di Pemerintah Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 2, No.1, Februari 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumarni dan Wahyuni. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

DAFTAR PUSTAKA

Aristanti Widyaningsih, 2011. *Moderasi Gaya Kepemimpinan Atas Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Budgetary Slack*. Dosen Universitas Pendidikan Indonesia. Vol. 6 No. 1 Juni 2011: 1-18.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Deddi Nordiawan (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: CV. ANDI OFFSET. Yogyakarta.

Mulyadi. 2001. *Sitem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Muhammad, Solichin, 2007. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol 08. No. 01. Yogyakarta

Nurhalimah, Darwanis, Syukriy Abdullah. 2013. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran*